



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Tower Telekomunikasi Harus Dikenakan Pajak

LEGISLATOR DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah untuk memanfaatkan ruang yang ada demi mendompleng pendapatan daerah.

Selain itu, dewan juga meminta agar pemerintah mengubah beberapa item penerimaan yang awalnya berupa retribusi menjadi pajak. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, begitu banyak menara telekomunikasi di pinggir jalan Jakarta. Kata dia, pengelolaan pendapatan dari menara itu harusnya dikelola oleh Bapenda dan dikenakan pajak setiap tahun.

"Itu mestinya dikelola oleh Bapenda dan bukan retribusi yang



Warta Kota/Yulianto

kami dapatkan, tapi harusnya pajak karena setiap tower itu punya kesibukan percakapan yang berbeda-beda," ujar Khoirudin pada Rabu (8/1/2025).

"Ini Bapenda hanya dapat Rp 1 juta rupiah seumur hidup. Seumur hidup, kan nggak logis dan itu bukan (pajak) Bapenda, itu retribusi," lanjut Khoirudin.

Karena itu, ungkap dia, nantinya penarikan pendapatan dari sektor itu bukan berupa retribusi tapi pajak. Apalagi Khoirudin merasa Pemerintah DKI cukup banyak memiliki aset yang bisa dimaksimalkan untuk kepentingan warga.

"Kami pemda yang punya asetnya, aset jalan. Jadi semua yang dimanfaatkan di badan jalan, harus masuk ke pemda semaksimal mungkin.

Provider kan banyak, sekarang internet menjadi kebutuhan di kehidupan Jakarta. Mestinya pajak dari ruang untuk lalu lintas percakapan, oleh provider maksimal ke Jakarta," jelasnya.

Jika diamati secara saksama, imbuhnya, pendapatan pajak yang dilakukan Pemda merupakan hal yang biasa. Dianggap biasa karena 'memaksa' para wajib pajak untuk mematuhi aturan yang dibuat pemerintah.

"Jadi yang bagus kan kalau pendapatan itu di luar

pajak. Walaupun pendapatan kami besar, kan baru 3,5 persen dari kota-kota besar di dunia, di Bangkok, di Kuala Lumpur, masih jauh. Jadinya kami masih harus memikirkan bagaimana mendapatkan tambahan pendapatan dari luar pajak," tuturnya.

Dengan label Jakarta sebagai kota jasa dan metropolitan, Khoirudin optimis sangat mungkin Jakarta bisa mengeruk pendapatan dengan maksimal. Terlebih begitu banyak pengusaha besar yang bermarkas di Jakarta, sehingga dia akan membahas potensi ini dengan Bapenda.

"Semua pengusaha besar ada di sini, nanti kami bincangkan dengan Kepala Bapenda, karena pajak sejatinya membebani rakyat. Untuk pajak rumah tangga, pajak orang per orang atau pendapatan. Setiap kenaikan pajak pasti teriak, karena itu beban," katanya.

"Negara yang sejahtera mengurangi pajak, dan pemerintah punya ruang untuk mendapatkan pendapatan di luar pajak," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pajak daerah hingga Rp 44,46 triliun pada 2024. Angka ini mencapai 98,85 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 44,98 triliun. (faf)